



Ekosentrisme Politik Daerah Bekas Tambang (Studi tentang Pengelolaan Danau Pading Desa Perlang)

Ridho Adha¹, Bustami Rahman², Bahjatul Murtasidin³

^{1,2,3}Universitas Bangka Belitung

Email : ridhoadha10199@gmail.com

Article Info

Article history:

Received July 12, 2025

Revised September 17, 2025

Accepted September 23, 2025

Keywords:

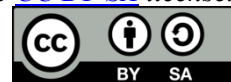
Green Politics, Tourism

Preservation, Danau Pading

ABSTRACT

This undergraduate thesis, entitled “Ekosentrisme Politik Daerah Bekas Tambang (Studi Tentang Pengelolaan Danau Pading Desa Perlang)” analyzes the implementation of Green Politics principles in tourism in Perlang Village, namely Danau Pading. This research aims to determine the management of Danau Pading tourism (a post-mining area) in Bangka Tengah Regency in achieving a green political zone. The method used in examining this problem is a case study method, with the type of research being qualitative research. This study uses Green Politics in analyzing the management of Danau Pading tourism. Environmental awareness and sustainability have begun to emerge through reforestation efforts and the transformation of former mining areas into environmentally sustainable tourism areas. This initiative was driven by the awareness of the youth of Perlang Village, who recognize the importance of environmental preservation for future generations. However, limitations in equitable economic access remain, requiring further attention. Collaboration between the Community-Based Groups (POKDARWIS), Village-Owned Enterprises (BUMDES), the Village Government, and the Tourism Office creates synergy that supports economic and ecological sustainability. It can be concluded that it is important to reflect the complexity of transforming former mining areas into sustainable tourism destinations.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 12, 2025

Revised September 17, 2025

Accepted September 23, 2025

Kata Kunci :

Politik Hijau, Pelestarian

Wisata, Danau Pading

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Ekosentrisme Politik Daerah Bekas Tambang (Studi Tentang Pengelolaan Danau Pading Desa Perlang)” ini menganalisis implementasi prinsip Politik Hijau pada wisata yang ada di Desa Perlang, yakni Danau Pading. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wisata Danau Pading (daerah pasca tambang) di Kabupaten Bangka Tengah dalam mencapai kawasan politik hijau. Metode yang digunakan dalam meneliti permasalahan tersebut adalah metode studi kasus, dengan jenis penelitian yakni penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan kajian *Green Politics* atau Politik Hijau dalam menganalisis pengelolaan wisata Danau Pading. Kesadaran dan keberlanjutan lingkungan telah mulai terwujud melalui upaya reboisasi dan transformasi lahan bekas tambang menjadi kawasan wisata yang memperhatikan aspek lingkungan berkelanjutan. Inisiatif ini didorong oleh kesadaran pemuda-pemudi Desa Perlang yang menyadari pentingnya pelestarian lingkungan untuk generasi



mendatang. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam pemerataan akses ekonomi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Kerjasama antara POKDARWIS, BUMDES, Pemerintah Desa, dan Dinas Pariwisata menciptakan sinergi yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan ekologi. Dapat disimpulkan bahwa penting untuk mencerminkan kompleksitas transformasi lahan bekas pertambangan menjadi destinasi wisata berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ridho Adha

Universitas Bangka Belitung

E-mail: ridhoadha10199@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara dimana masuk kedalam kategori negara yang sedang berkembang. Pemerintah sendiri gencar melakukan pembangunan dalam berbagai aspek. Perkembangan kegiatan ekonomi dan lingkungan mengalami ketidakseimbangan antara lain, pembangunan ekonomi cenderung pada eksploitasi terhadap sumber daya alam. Dampak dari eksploitasi alam dapat dirasakan oleh masyarakat yang dapat kita lihat rusaknya lingkungan sedikit demi sedikit “Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dalam memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia serta meningkatkan kesejahteraan” (Sari, 2012). Aktivitas tersebut, telah menghasilkan dampak lingkungan yang besar berupa area bekas tambang yang memerlukan penanganan serius. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2020), terdapat sekitar 2,8 juta hektar lahan bekas tambang yang sebagian besar mengalami kerusakan ekologis dan belum direhabilitasi secara optimal.

Salah satu daerah penghasil timah yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana merupakan daerah yang memanfaatkan sektor pertambangan dan menjadikan sumber daya timah sebagai komoditas andalan. Pertambangan timah pertama kali dilakukan pada abad ke-17, yaitu di zaman pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Pada tahun 1952 pengelolaan aktivitas pertambangan secara resmi diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Peranan komoditas timah dari daerah ini telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi devisa negara dan perekonomian daerah (Sujitno, 2007).

Masyarakat yang berada di Kabupaten Bangka Tengah amat bergantung pada kegiatan pertambangan (Fajriansyah, 2024). Aktivitas pertambang timah yang sudah dilakukan di Kabupaten Bangka Tengah banyak menimbulkan wilayah kritis misalnya yakni bekas galian berupa kolong dan rusaknya daerah pesisir pantai. Banyaknya lahan bekas tambang menimbulkan keresahan masyarakat dimana masyarakat khawatir karena kurangnya daerah resapan dapat menimbulkan banjir. Lahan bekas penambangan timah berupa pasir dan danau-danau kecil jika tidak ada upaya pemanfaatan dan pengolahan akan mengakibatkan suatu dampak pada lingkungan.



Lahan berupa lubang bekas tambang yang menurut istilah di wilayah Bangka Belitung disebut dengan Kolong, terjadi akibat dari aktivitas pertambangan timah yang mana pengelolaannya tidak memperhatikan aspek lingkungan. Bangka Tengah sendiri memiliki sekitar 1.731 dengan total luas 2.535.090 hektar lahan bekas pertambangan timah (Ismi, 2022). Kolong atau lubang bekas penambangan bijih timah yang dibiarkan begitu saja dan akan menjadi nilai ekonomis jika dikelola dengan baik (Ibnu dalam Martini, 2019). Kolong atau kolam bekas tambang dapat dimanfaatkan menjadi sumber air bersih, perikanan, peternakan, dan objek wisata (Henny, 2011). Penanaman kembali pohon seperti jenis pohon akasia dan sengan pada hamparan pasir dari lahan bekas tambang dapat memperbaiki fisik dan kimia tanah.

Kolong atau kolam bekas tambang yang ditinggalkan berpuh tahun memiliki potensi tersendiri dan dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Mengubah daerah peninggalan kegiatan tambang dapat menjadikan alternatif pengembangan wisata bekas tambang sebagai sumber objek wisata (Ballesteros dan Rami'rez, 2007). Kemudian pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai objek wisata selain dapat meningkatkan perekonomian dan kehidupan sosial, juga mampu mengembalikan kondisi lahan bekas tambang secara bertahap. Kerusakan lingkungan pascatambang tidak hanya menyangkut perubahan fisik lahan, tetapi juga mencakup pencemaran sumber air, penurunan kualitas tanah, punahnya biodiversitas, serta terputusnya keterkaitan ekologis antara manusia dan alam sekitarnya. Dalam konteks ini, pendekatan ekosentrisme menjadi sangat penting sebagai alternatif pandangan yang menempatkan lingkungan sebagai pusat dalam proses perumusan kebijakan dan Pembangunan.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *Green Politics* atau politik hijau yang dikembangkan oleh Matthew Paterson (2001). Ia menegaskan bahwa penyelesaian krisis lingkungan tidak cukup melalui langkah-langkah teknokratis atau kebijakan yang bersifat pragmatis semata, melainkan membutuhkan perubahan mendasar dalam cara pandang manusia terhadap alam, kekuasaan, dan pembangunan. *Green Politics* menantang sistem sosial-politik yang bersifat antropocentris dan mendorong terbentuknya paradigma baru yang menjadikan lingkungan hidup sebagai nilai utama, bukan sekadar objek eksploitasi ekonomi.

Dalam kerangka politik ekosentris, lingkungan hidup dipandang memiliki nilai intrinsik yang sejajar dengan keberadaan manusia. Hal ini sejalan dengan konsep *Deep Ecology*, yang mendasarkan gerakannya pada nilai-nilai moral dari teori ekosentrisme, telah mendorong perubahan mendasar dalam cara manusia memandang dan memperlakukan alam (Satmaidi, 2015). Oleh karena itu, pengelolaan wilayah bekas tambang seharusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip yang mengharmoniskan antara kebutuhan ekologi dan sosial secara berkelanjutan, bukan sekadar mengejar keuntungan ekonomi.

Banyaknya lubang dan kolam serta lahan yang rusak akibat dari aktivitas pertambang timah yang dilakukan tidak memperhatikan pembangunan berkelanjutan. Hal ini diperlukan perhatian pemerintah untuk mengatasi masalah lingkungan. Adapun Perda Kabupaten Bangka Tengah No 4 tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019-2015, menerangkan bahwa tujuan pariwisata Bangka Tengah salah satunya yakni memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. Pada peringatan Puncak Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS) Tahun 2021,



Pemerintah Provinsi Bangka Belitung melakukan penghijauan Kawasan dengan melakukan reboisasi di obyek wisata Danau Pading. Adapun sebanyak 2000 bibit pohon produktif, seperti mangga, jambu, dan rambutan, serta bibit pohon (Budi, 2021).

Desa Perlang mampu memperbaiki kawasan pasca tambang sebagai daerah pariwisata. Danau Pading berhasil menjadi objek wisata yang telah dibangun oleh masyarakat Desa Perlang yang sebelumnya merupakan daerah pasca tambang dimana jauh dari kata kawasan hijau. Namun masyarakat Desa Perlang mampu membangun kembali daerah kritis akibat tambang menjadi pariwisata yang menonjolkan keindahan alam. Selain itu penanaman kembali pohon-pohon oleh masyarakat dan pemerintah, yang sebelumnya daerah sekitar danau pading yang gersang menjadi daerah yang seolah-olah tidak pernah disentuh pertambangan.

Green economy atau ekonomi hijau sebuah gagasan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial tanpa adanya risiko kerusakan alam (Asiyah, 2017:22). *Green Economy* ialah menerapkan konsep ekonomi baru yang berorientasi pada peningkatan aspek ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan. *Green economy* adalah suatu kegiatan ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko kerusakan alam secara signifikan (Sari, 2013). Dari beberapa pemahaman tersebut dapat disimpulkan *green economy* merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat dan sumber daya alam itu sendiri (Nurlinda, 2012).

Pascareformasi, kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam, termasuk reklamasi dan rehabilitasi pascatambang. Namun, kewenangan ini sering kali menimbulkan konflik kepentingan antara tuntutan pembangunan ekonomi, tekanan dari pelaku industri, dan perlindungan lingkungan.

Dalam konteks ini, Bryant dan Bailey (2001) menyoroti bahwa dinamika politik lingkungan di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh berbagai aktor dengan agenda masing-masing, seperti korporasi tambang, elit lokal, dan organisasi masyarakat sipil. Teori *Green Politics* yang ditawarkan oleh Paterson memberikan kerangka kritis dalam menganalisis bagaimana kekuasaan digunakan dan bagaimana komitmen terhadap lingkungan sering kali dilemahkan oleh orientasi ekonomi jangka pendek. Lebih lanjut, pendekatan *environmental governance* dari Lemos dan Agrawal (2006) menekankan pentingnya tata kelola lingkungan yang inklusif dan kolaboratif antara aktor negara dan non-negara. Dalam pengelolaan wilayah bekas tambang, keberhasilan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan lingkungan yang adil, demokratis, dan berkelanjutan, sebagaimana diusung oleh semangat *green political theory*, yang menjunjung tinggi nilai-nilai partisipasi, keadilan ekologis, dan keberlanjutan.

Salah satu contoh dari transformasi ini dapat dilihat pada Danau Pading di Desa Perlang, yang terbentuk akibat aktivitas pertambangan timah yang tidak disertai upaya pemulihan. Meski awalnya merupakan warisan kerusakan ekologis, danau ini kemudian berkembang menjadi ruang publik yang digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas. Pemuda lokal bersama pemerintah desa dan kelompok masyarakat lainnya mulai menggagas pengelolaan danau yang mengintegrasikan aspek ekologis dan sosial, bukan sekadar ekonomi.



Penelitian ini menjadi relevan karena memperlihatkan bagaimana nilai-nilai lingkungan hidup bisa diangkat ke dalam diskursus politik lokal dan dijadikan pijakan dalam pengambilan kebijakan. Politik hijau tidak hanya menekankan soal konservasi lingkungan, tetapi juga membangun counter-hegemony terhadap dominasi kapitalisme yang destruktif dengan menegakkan prinsip keberlanjutan, keadilan ekologis, dan demokrasi partisipatif (Paterson, 2001).

Pengelolaan Danau Pading merupakan contoh dari proses *just ecological transition*, yaitu perubahan menuju ekonomi hijau yang adil, di mana masyarakat yang dulunya menggantungkan hidup dari pertambangan mulai beralih ke kegiatan berbasis ekowisata dan pelestarian lingkungan. Konsep transisi ini selaras dengan gagasan green politics yang tidak hanya berorientasi pada lingkungan semata, melainkan juga memperjuangkan keadilan sosial bagi komunitas terdampak.

Proses pemulihan Danau Pading mencerminkan perubahan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial dan simbolik. Menurut (Choi, 2004) menyebutnya sebagai proses pemulihan ekologi yang juga menyentuh nilai-nilai budaya dan hubungan manusia dengan alam. Pendekatan yang menyatukan ekosentrisme dan prinsip green politics menjadi pijakan penting untuk membangun sistem tata kelola danau yang berkelanjutan, adil, dan partisipatif.

Politik hijau menjelaskan tentang krisis lingkungan yang akan dihadapi oleh umat manusia, namun setelah menghadapi umat manusia juga melakukan perlindungan agar selalu terjaga keseimbangannya (Patterson, 2005). Sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Perlang sudah menggambarkan bahwa mereka sudah mendukung politik hijau. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip ekosentrisme dalam kerangka *Green Politics Theory* Matthew Paterson pada tataran kebijakan lokal pascatambang, serta bagaimana pendekatan tersebut membentuk pola pengelolaan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Martono (2015: 212) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai upaya menganalisis masalah sosial berdasarkan sudut pandang informan dalam lingkungan ilmiah. Dengan demikian, penelitian kualitatif deskriptif berfokus pada analisis, deskripsi, dan menyimpulkan data lapangan yang di peroleh melalui observasi atau wawancara dengan informan terkait masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan di desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder dengan teknik penentuan informan yakni, *purposive sampling*. Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data yakni, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Desain Pengembangan Pariwisata Hijau Di Desa Perlang Bangka Tengah

Teori Politik Hijau menjelaskan bahwa manusia memiliki hubungan erat dengan alam. Manusia tidak dipandang sebagai individu rasional atau makhluk sosial, melainkan bagian dari alam itu sendiri yang berperan langsung dalam menjaga lingkungan. Politik Hijau dalam



menghadapi permasalahan lingkungan berfokus pada peningkatan kesadaran individu dan kepekaan dalam pelestarian atau menjaga lingkungan yang ada. Politik Hijau melakukan pendekatan dengan metode desentralisasi. Yakni sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola masing-masing daerah.

Dalam RPJMD Bangka Tengah Tahun 2021-2026, menyatakan bahwa maraknya terjadi aktivitas kerusakan lingkungan pada daerah Bangka Tengah. Hal itu disebabkan kurangnya SDM pengamanan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti penting menjaga lingkungan. Namun, warga setempat mengubah bekas pertambangan tersebut menjadi tempat wisata, salah satunya adalah Danau Pading yang ada di Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Bangka Tengah. Meskipun begitu, terdapat permasalahan pariwisata yang terjadi sebagai mana belum semua daerah tempat wisata memiliki amenities yang memadai, daya tarik wisata yang dianggap kurang, infrastruktur menuju tempat wisata dapat terbilang kurang, dan pelaksanaan program kerja atau kegiatan kepariwisataan yang belum komprehensif. Selain itu, dinamika lainnya adalah kurangnya kualitas SDM setempat dalam melestarikan Danau Pading agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.

Untuk hal itu, Dinas Pariwisata mengadakan program atau kebijakan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di Danau Pading, seperti melakukan pendampingan-pendampingan kepada POKDARWIS, memenuhi prasarana dan sarana pariwisata seperti toilet, gazebo, mushola, dan akses jalan. Program selanjutnya yakni pengembangan SDM dengan melakukan pelatihan kepada masyarakat setempat atau pengelola.

Visi RPJMD Bangka Tengah Tahun 2021-2026 yang telah disampaikan oleh Bupati pada saat pemilu yakni “Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang Semakin Unggul”. Visi tersebut selaras dengan Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yaitu “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi, Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Salah satu Misi dari RPJMD Bangka Tengah Tahun 2021-2026 adalah “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkualitas Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Keunggulan daerah dapat dilihat dari sumber daya manusianya yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu dengan membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani yang memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan budaya. Peningkatan kualitas SDM terutama diupayakan melalui: 1) pendidikan yang berkualitas, berakarakter, bermoral dan berakhlak mulia, 2) layanan kesehatan yang terjangkau, merata dan berkualitas.

Misi lainnya adalah “Mewujudkan Lingkungan yang yang Unggul serta Berkelanjutan”. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang unggul serta berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan



dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan pemukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi guna mempertahankan keanekaragaman hayati, meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan dan dapat mengurangi intensitas dan cakupan bencana, serta tetap menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan keberlangsungan pembangunan agar dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang.

Dalam rangka mengembangkan SDM untuk melestarikan Danau Pading di Desa Perlang berdasarkan Visi Misi RPJMD Bangka Tengah Tahun 2021-2026, peneliti menggunakan Teori Politik Hijau. Teori Politik Hijau menyatakan bahwa manusia terlibat dalam pelestarian alam. Dalam mengembangkan Danau Pading, manusia sebagai individu terbagi dalam tiga peran sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai Pendukung

Peran Pemerintah dalam mengembangkan atau melestarikan Danau Pading sebagai pendukung, yang mana dapat memberikan kebijakan-kebijakan, pengawasan dan penegakan hukum, pendidikan atau pelatihan, pengembangan, dan pemantauan. Dalam hal ini, berdasarkan wawancara dengan salah satu Kepala Bidang Dinas Pariwisata Bangka Tengah, telah mengambil langkah-langkah mendukung, yakni membersamai masyarakat untuk menghidupkan lahan yang selama ini nol kebermanfaatan akibat aktifitas tambang menjadi destinasi wisata Danau Pading yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Perlang.

2. Masyarakat sebagai Pengelola

Masyarakat sekitar berperan dalam melakukan pengembang wisata, menjadi edukator dan penjaga, dan pengawas. Awal mula Danau Pading terbentuk karena peran dan gerakan pemuda yang mempunyai keinginan untuk membentuk suatu kelompok wisata dengan memanfaatkan bekas pertambangan. Pemuda-pemuda tersebut berkoordinasi serta berkolaborasi dengan POKDARWIS dapat tampil di kancah nasional sebagai desa wisata Indonesia.

3. Pengunjung

Selain menikmati wisata, tentu masyarakat sebagai pengunjung berperan juga dalam menjaga ekowisata yang dikunjungi. Pengunjung diharuskan mengikuti aturan yang berlaku, tidak merusak alam atau fasilitas yang tersedia, menjaga kebersihan lingkungan, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini pengelola diharapkan dapat membuat aturan sebagaimana mestinya untuk menjaga pelestarian wisata Danau Pading.

B. Penerapan Prinsip Politik Ekonomi Hijau Dalam Pengembangan Pariwisata Di Danau Padang Desa Perlang

Green Politics Theory sebagai kerangka analisis memberikan sepuluh nilai fundamental yang menjadi landasan dalam mengkaji implementasi politik ekonomi hijau di Danau Pading. Kesepuluh nilai tersebut meliputi kesadaran dan keberlanjutan ekologi, demokrasi akar rumput, keadilan sosial dan persamaan kesempatan, anti-kekerasan, desentralisasi, ekonomi berbasis komunitas dan berkeadilan, feminisme dan kesetaraan gender,



penghormatan terhadap keberagaman, tanggung jawab personal dan global, serta fokus pada masa depan dan keberlanjutan. Setiap nilai ini akan menjadi lensa analisis dalam memahami kompleksitas pengelolaan Danau Pading sebagai manifestasi ekonomi hijau di tingkat lokal.

1. Kesadaran dan Keberlanjutan Ekologi

Kesadaran ekologi adalah pondasi utama dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan. Tanpa pemahaman akan pentingnya menjaga keseimbangan alam, upaya pelestarian hanya akan bersifat sementara dan tidak efektif. Kesadaran ekologi yang dimaksud pada penelitian ini apakah pariwisata yang ada di Desa Perlang Danau Pading pada pengelolaannya sudah mementingkan lingkungan yang dapat mendukung aktivitas pariwisata yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Kemudian, Pemerintah daerah memberasamai masyarakat dan pemdes juga melakukan penghijauan melalui reboisasi atau penghijauan kembali. Hal ini pun diakui terjadi karena peran pemuda pemudi di Desa Perlang yang telah menyadari pentingnya keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2. Demokrasi Akar Rumput

Demokrasi akar rumput dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan menekankan pada partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkeadilan sosial. Melalui mekanisme musyawarah, penyampaian aspirasi, serta pengambilan keputusan secara inklusif, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga pemegang kendali dalam menentukan arah kebijakan pariwisata yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Demokrasi Akar Rumput yakni melibatkan masyarakat bawah menengah dan atas, demokrasi akar rumput yang dimaksud oleh peneliti yakni dalam pembangunan atau proses perbaikan dalam mendukung Pariwisata Danau Pading melibatkan seluruh aspek masyarakat kelas bawah, menengah, dan atas. Pengelolaan Danau Pading menjadi contoh nyata praktik demokrasi akar rumput, di mana masyarakat, khususnya pemuda-pemudi Desa Perlang, berperan aktif melalui inisiatif pembentukan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Inisiatif ini mencerminkan keterlibatan langsung warga dalam merancang dan mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Keadilan Sosial dan Persamaan Kesempatan

Pada prinsip ini, *Green Politics Theory* menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dalam menjaga lingkungan. Setiap kelompok masyarakat dituntut untuk memiliki rasa keadilan dalam mengelola dan melestarikan alam mereka. Hal tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lestari juga berkelanjutan. Dalam hal ini, setiap lapisan masyarakat Desa Perlang tentu memiliki kesempatan dalam melestarikan Danau Pading dan menikmati hasil dari wisata tersebut. Pada situasi di Danau Pading, pemuda-pemudi Desa Perlang secara langsung turun tangan dalam mengelola tepat wisata tersebut. Lalu, keterlibatan masyarakat desa dapat terlihat melalui UMKM kegiatan event-event besar di Danau Pading. Selain itu, keuntungan dari wisata Danau Pading juga diterima BUMDES yang kemudian dapat meningkatkan perekonomian Desa. Prinsip keadilan sosial ini telah dilaksanakan melalui upaya melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam aktivitas ekonomi wisata. POKDARWIS memastikan manfaat dari



pariwisata tersebut dapat didistribusikan secara adil seperti keuntungan diserahkan kepada BUMDES dan masyarakat lainnya dapat ikut serta seperti membuka UMKM.

Meskipun begitu, terdapat tantangan dalam hal pemerataan ekonomi yang mana masih terbatas pada kelompok tertentu yang juga terlibat dengan aktivitas wisata. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan situasi diskriminasi dalam pemanfaatan peluang ekonomi wisata. Hal tersebut dapat menyebabkan hanya kelompok tertentu yang memiliki modal dan akses yang dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam memanfaatkan ekonomi wisata agar dapat mewujudkan keadilan sosial.

4. Anti Kekerasan

Prinsip tersebut dalam Politik Hijau menegaskan pentingnya menyelesaikan sebuah konflik sosial dengan cara damai dan solutif. Prinsip ini menghilangkan kebiasaan masyarakat yang melibatkan kekerasan dalam menyelesaikan konflik. Prinsip ini diterapkan di Danau Pading terlihat melalui cara kelompok pemuda dengan Pemdes yang melakukan pendekatan persuasif untuk mengatasi kontroversi masyarakat dalam pembangunan wisata tersebut. Dengan pendekatan yang mengutamakan ajakan dan diskusi, yang secara langsung menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian masalah tanpa kekerasan. Dalam wawancara tersebut, masyarakat yang merupakan warga asli desa lebih memilih untuk memberi himbauan kepada penambang yang bukan warga asli desa. Selain itu, pemerintah desa juga turut membantu masyarakat sebagai penengahnya. Membangun hubungan sosial yang baik dalam mengatasi masalah tanpa menimbulkan konflik yang bersifat kekerasan. Hal itu dapat dikatakan sejalan dengan prinsip anti kekerasan yang menekankan pentingnya menjaga kenyamanan dengan pemahaman bersama.

Pemerintah Desa Perlang juga menekankan penting untuk koordinasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak agar terhindar dari konflik dalam pengelolaan wisata. Secara tidak langsung aksi tersebut dapat dikatakan mencegah konflik daripada menyelesaikan konflik setelah terjadinya perbedaan pemahaman. Keterlibatan tokoh-tokoh warga desa juga menjadi strategi penting dalam proses komunikasi. Pengembangan SDM tersebut tentu melibatkan Karang Taruna, ibu-ibu PKK, tokoh agama, dan individu atau kelompok lainnya yang memiliki peran-peran penting dalam mendukung pengembangan Pariwisata berkelanjutan. Keterlibatan dari berbagai lapisan masyarakat ini tentu membantu dalam membangun musyawarah dan berpotensi mengurangi konflik.

5. Desentralisasi

Pengambilan keputusan diharuskan berada pada tingkat individu dan warga lokal yang terlibat. Sistem pemerintahan yang sebaiknya memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah seperti perangkat desa dalam mengelola sebuah wilayah. Prinsip desentralisasi dalam Politik Hijau ini menjelaskan pentingnya memberikan kewenangan pada tingkat daerah dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi ekonomi kehidupan masyarakat. Dalam pengelolaan Danau Pading, masyarakat lokal terlibat secara langsung berkolaborasi dengan pihak perangkat desa. Kemudian, Otonomi daerah memberikan kesempatan untuk warga lokal berkreativitas dalam mengembangkan wisata berdasarkan dengan karakteristik dan kebutuhan warga sekitar. Dalam hal ini, melalui otonomi yang dimiliki oleh



PORKDARWIS dalam mengelola Danau Pading untuk mengajak kolaborasi dengan pihak-pihak yang sekiranya bisa membantu pelestarian wisata tersebut. Desentralisasi dalam mengelola Danau Pading ini tidak menutup dari pemetintahan, justru pihak masyarakat melakukan pola kolaborasi yang saling mendukung.

6. Ekonomi Berbasis Komunikasi dan Berkeadilan

Politik Hijau memandang bahwa penting untuk menerapkan suatu sistem ekonomi berkelanjutan, yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan keseimbangan ekologis. Dalam konteks Danau Pading, prinsip ini diterapkan melalui struktur pengelolaan yang melibatkan PORKDARWIS serta BUMDES dalam mengatur serta mendukung pengelolaan wisata. Salah satu bentuk POKDARWIS dalam mengembangkan ekonomi pariwisata dengan berkolaborasi ke pemerintah. Bantuan pemerintah berupa bibit buah, pohon cemara, pondopo, mushola, lahan parkir, jalan, sama tong sampah, dan untuk homestay telah diajukan namun belum mendapatkan perizinan. Ada juga bantuan berupa tambak ikan beserta bibit dan pakannya untuk menambah pendapatan di sini. Selain itu, masyarakat lokal juga dapat membuka bazar UMKM yang dapat membantu ekonomi mereka di event-event besar Danau Pading. Aksi dari POKDARWIS tersebut menunjukkan komitmen terhadap pembagian hasil yang mengutamakan kepentingan komunitas yang dapat membantu perekonomian masyarakat desa.

7. Feminisme dan Kesenjangan Gender

Perbedaan pendapat dan gender perlu dihormati demi menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan nyaman. Maka dari itu, nilai-nilai kemanusiaan perlu dikembangkan dan dijaga dengan kesadaran moral. Prinsip feminisme dan kesetaraan gender dalam Teori Politik Hijau ini menegaskan betapa pentingnya mendapatkan partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek pengambilan keputusan dalam mengelola sesuatu. Prinsip tersebut telah diterapkan dalam pengelolaan Danau Pading meski masih menunjukkan keterbatasan yang signifikan. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa penerapan kesetaraan gender masih menghadapi tantangan. Faktor pendidikan tentu menjadi tanggung jawab setiap pemuda atau pemudi dalam usia sekolah. Namun tanggung jawab lainnya seperti tugas IRT dan sebagainya menjadi hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam struktur organisasi pengelolaan wisata.

Meskipun minim partisipasi dalam pengelolaan wisata, perempuan dalam situasi Danau Pading ini juga memiliki peran penting dalam ekonomi wisata melalui keterlibatan bazar UMKM dan aktivitas ekonomi informal. POKDARWIS juga melibatkan ibu-ibu PKK dalam membangun serta menjaga kelestarian wisata Danau Pading. Partisipasi perempuan dalam UMKM selama festival Danau Pading menunjukkan kontribusi dalam bidang ekonomi secara signifikan. Akan tetapi, partisipasi ini bersifat sementara, tergantung pada situasi di Danau Pading dan belum terlibat dalam sistem pengelolaan secara keseluruhan dan langsung. Diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan peran aktif perempuan dalam setiap aspek pengelolaan.

8. Penghormatan Terhadap Keberagaman

Prinsip ini menjelaskan betapa pentingnya mengakui dan menghormati dalam setiap aspek, termasuk keberagaman agama, budaya, ras, dan etnis. Politik Hijau mendukung



masyarakat yang minoritas dari peran kepemimpinan untuk menjadi pemimpin. Selain itu, dapat melibatkan kelompok-kelompok yang jarang terlibat untuk ikut serta dalam pengembangan sebuah wisata. Dalam konteks Danau Pading, prinsip ini diterapkan melalui sikap toleran dan mengajak yang ditunjukkan oleh masyarakat dan pengelola wisata. Sikap tersebut menunjukkan adanya komitmen terhadap perbedaan yang tidak hanya dalam segi konseptual namun juga praktis. Setiap kelompok masyarakat turut terlibat dalam kegiatan-kegiatan desa tanpa memandang latar belakang agama. Hal tersebut menunjukkan prinsip keberagaman yang diterapkan dengan baik.

9. Tanggung Jawab Personal dan Global

Setiap individu diharapkan mendukung peningkatan kesejahteraan hidup tanpa mengabaikan keseimbangan ekologi dan harmoni sosial. Prinsip ini menegaskan tentang pentingnya setiap individu memahami dampak dari tindakannya lingkungan hidup. Dalam Danau Pading, prinsip ini diimplementasikan dengan melalui upaya edukasi lingkungan yang dilakukan kepada pengunjung untuk menjaga lingkungan.

POKDARWIS memberikan edukasi kepada pengunjung atau masyarakat desa untuk menjaga lingkungan, seperti jangan membuang sampah sembarang di kawasan wisata. Upaya tersebut dilakukan untuk menunjukkan kesadaran akan pentingnya membangun tanggung jawab personal dalam menjaga lingkungan. Meskipun menghadapi tantangan dalam penerapannya, inisiatif tersebut dapat dikatakan sebagai langkah awal dalam membangun kepedulian lingkungan yang berkelanjutan Implementasi prinsip tersebut juga masih sebatas diinisiasi oleh pengelola dan warga sekitar. Penerapannya masih menghadapi keterbatasan dalam hal kerja sama dengan instansi lingkungan atau pihak lainnya yang serupa Keterbatasan tersebut menunjukkan kurangnya kerja sama dengan pihak yang lebih luas dan diperlukan pengembangan jaringan untuk mendukung implementasi prinsip tersebut. Kerja sama dengan instansi terkait dapat memberikan dukungan secara teknis maupun finansial yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan wisata berkelanjutan. Keterbatasan tersebut dapat diatasi dengan pengembangan kerjasama yang lebih luas di masa depan.

10. Fokus pada Masa Depan dan Keberlanjutan

Politik Hijau mengembangkan sistem berkelanjutan untuk menjaga sumber daya alam yang tersedia serta kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi pariwisata. Prinsip ini berfokus pada masa depan dan keberlanjutan dari wisata tersebut, yang berarti menegaskan arti penting perencanaan jangka panjang dengan mempertimbangkan dampak keputusan saat ini yang mungkin akan dirasakan pada generasi mendatang. Strategi jangka panjang POKDARWIS untuk memastikan pariwisata Danau Pading tetap berkelanjutan secara ekologi dan ekonomi adalah perencanaan membuat outbond. Perbaikan fasilitas berkala seperti dermaga yang menjadi ikon tempat foto. Rencana tersebut menunjukkan adanya visi jangka panjang yang tidak hanya fokus pada pemanfaatannya saja, namun juga memodifikasi produk wisata untuk menjamin keberlanjutan. Perbaikan fasilitas berkala juga menunjukkan komitmen dalam pemeliharaan wisata untuk ke depannya.



C. Tantangan dan Hambatan

1. Keterbatasan Sumber Daya

Penerapan prinsip-prinsip Teori Politik Hijau pada pengelolaan Danau Pading masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang signifikan. Salah satu tantangannya yakni sumber daya yang masih terbatas dalam menerapkan di berbagai program dan kegiatan pelestarian. Keterbatasan anggaran ini tentu berdampak pada kemampuan untuk menerapkan program-program yang mendukung pelestarian wisata, seperti kegiatan pameran. Promosi yang terbatas mengakibatkan terhambatnya pengembangan wisata dan akan memengaruhi keberlanjutan ekonomi desa terutama warga lokalnya.

2. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Selain sumber daya yang menjadi hambatan, kebutuhan akan sumber daya manusia juga diperlukan untuk keberlanjutan wisata. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip *Green Politics Theory*. Permasalahan tersebut memengaruhi konsistensi dalam mengelola wisata dan penerapan program-program pelestarian Danau Pading. Kapasitas SDM yang terbatas juga terlihat dari teknis pengelolaan lingkungan. Dan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam pemeliharaan tanaman dan perawatan lingkungan juga masih menjadi hambatan dalam implementasi prinsip keberlanjutan ekologi.

D. Peluang dan Potensi Pengembangan

1. Potensi Ekonomi yang Belum Optimal

Meskipun dalam pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, Danau Pading juga memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi lebih lanjut. Potensi ekonomi secara tidak langsung ditunjukkan melalui perputaran ekonomi yang mencapai keuntungan ratusan juta rupiah selama acara-acara besar menunjukkan bahwa model ekonomi berbasis komunitas (UMKM) dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Peluang untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan pengembangan wisata masih terbuka lebar.

2. Inovasi dalam Pengelolaan

Potensi lainnya yang harus dilakukan adalah berinovasi dalam peningkatan pariwisata untuk berkelanjutan. Penggunaan teknologi digital seperti media sosial sebagai media promosi menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Inovasi tersebut menunjukkan potensi untuk mengembangkan model pengelolaan wisata yang lebih modern dan efektif. Adapun lainnya dari pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemuda desa memiliki peran krusial dalam transformasi digital, sementara kolaborasi antar Lembaga desa memperkuat keberlanjutannya. Dengan memanfaatkan media social, desa tidak hanya menjadi lebih dikenal, tetapi juga mandiri secara ekonomi dan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai implementasi politik ekonomi hijau dalam pengelolaan Danau Pading di Desa Perlang, Kabupaten Bangka



Tengah, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang mencerminkan kompleksitas transformasi lahan bekas pertambangan menjadi destinasi wisata berkelanjutan.

Penerapan sepuluh nilai fundamental Green Politics Theory dalam pengelolaan Danau Pading menunjukkan hasil yang bervariasi. Kesadaran dan keberlanjutan lingkungan telah mulai terwujud melalui upaya reboisasi dan transformasi lahan bekas tambang menjadi kawasan wisata yang memperhatikan aspek lingkungan berkelanjutan. Inisiatif ini didorong oleh kesadaran pemuda-pemudi Desa Perlang yang menyadari pentingnya pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Prinsip demokrasi akar rumput terwujud dengan baik melalui keterlibatan aktif masyarakat lokal, khususnya pemuda, dalam pembentukan dan pengelolaan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan wisata menunjukkan penerapan yang efektif dari nilai-nilai demokratis berbasis komunitas. Keadilan sosial dan persamaan kesempatan tercermin melalui sistem distribusi keuntungan wisata yang dikelola melalui BUMDES, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi wisata melalui UMKM. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam pemerataan akses ekonomi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Prinsip tanpa kekerasan berhasil diwujudkan dengan pendekatan yang mengedepankan dialog dan persuasi dalam menangani konflik, terutama dalam mengubah lahan tambang menjadi kawasan wisata. Sementara itu, desentralisasi tercapai dengan memberikan kemandirian kepada warga setempat dalam pengelolaan pariwisata, didampingi oleh bantuan dan pengawasan dari pemerintah daerah. Adapun pengelolaan di Danau Pading pada penelitian ini mengidentifikasi tiga peran utama stakeholder dalam penerapan ekonomi hijau. Pertama, pemerintah berperan sebagai pendukung melalui pemberian kebijakan, pengawasan, pendidikan, dan penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata. Kedua, masyarakat berperan sebagai pengelola utama yang mengembangkan, mengelola, dan menjaga kelestarian wisata melalui inisiatif komunitas. Ketiga, pengunjung berperan dalam menjaga kelestarian ekowisata dengan mengikuti aturan dan menjaga kebersihan lingkungan. Kolaborasi antar stakeholder menunjukkan model governance yang efektif dalam mengelola sumber daya alam berbasis komunitas. Kerjasama antara POKDARWIS, BUMDES, Pemerintah Desa, dan Dinas Pariwisata menciptakan sinergi yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan ekologi.

Saran

1. Saran untuk Pemerintah Daerah

Peningkatan Alokasi Anggaran seperti, meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk promosi pariwisata berkelanjutan, termasuk untuk kegiatan pameran dan media promosi yang lebih luas. Mengembangkan skema pembiayaan berkelanjutan melalui kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga keuangan. Selanjutnya pemerintah diharapkan dapat membentuk unit khusus pengelolaan pariwisata berkelanjutan di tingkat kabupaten. Kemudian pemerintah dapat melakukan Pengembangan Kebijakan Pendukung seperti, menyusun regulasi khusus tentang pengelolaan pariwisata berkelanjutan di lahan bekas tambang. Mengembangkan insentif bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam program pelestarian lingkungan.



2. Saran untuk POKDARWIS dan Pengelola Wisata

Peningkatan Kapasitas SDM dapat dilakukan dengan, mengadakan pelatihan rutin tentang pengelolaan pariwisata berkelanjutan serta manajemen keuangan, dan pemasaran digital. Kemudian melakukan regenerasi kepengurusan dengan melibatkan lebih banyak pemuda dan Perempuan. Mengembangkan sistem manajemen yang lebih profesional dan berkelanjutan. Mengembangkan paket wisata edukatif tentang rehabilitasi lahan bekas tambang. Menciptakan atraksi wisata yang mengintegrasikan budaya lokal dengan konservasi lingkungan serta mengembangkan homestay dan fasilitas penunjang lainnya. Kemudian dengan penguatan Jaringan Kerjasama seperti, mengembangkan kemitraan dengan NGO lingkungan dan organisasi pariwisata serta memperluas jaringan pemasaran melalui platform digital dan agen perjalanan.

3. Saran untuk Pemerintah Desa

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan dengan mengembangkan program pemberdayaan khusus untuk perempuan dan kelompok marginal. Membuat sistem reward bagi masyarakat yang berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Menyelenggarakan forum diskusi rutin tentang pengembangan pariwisata desa. Penguatan Ekonomi Lokal dengan cara mengembangkan program pelatihan UMKM yang berkelanjutan. Menciptakan sistem distribusi peluang ekonomi yang lebih adil. Memfasilitasi akses permodalan untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usaha pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Burchill, S dan Linklater, Andrew, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, terj. M. Sobirin, (Bandung : Nusa Media, 1996).
- Eckersley, R. 2006. "Green Theory". London : Oxford University Press.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2010.
- Henny, C., 2011. "Kolong" bekas tambang timah di Pulau Bangka: permasalahan kualitas air dan alternatif solusi untuk pemanfaatan. *Oseanologi dan Limnologi Indonesia* 37(1), pp.119-138
- Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Raja Grafindo Persada
- Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Patterson, Matthew, *Theories of International Relations, Third edition*, (New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2005).
- Robbins, Paul. *Political Ecology: Second Edition*. Oxford: John Wiley & Sons Ltd, 2012.
- Sale, Kirk, Patrik, *Revolusi Hijau: Sebuah Tinjauan Historis-Krisis Gerakan Lingkungan Hidup di Amerika*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Satmaidi, Edra. "Konsep Deep Ecologi dalam Pengaturan Hukum Lingkungan". *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*. Vol. 24, No. 2, Agustus 2015.



- Sugiyono. 2016. (ed). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti R. 1992. Jakarta: Memahami Ilmu Politik.
- Tohirin. 2012. *Metode penelitian Kualitatif dalm Pendidikan dan bimbingan Konseling*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Widodo. 2017. (ed). *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Jakarta.
- Sujitno, S.(2007). *Sejarah penambangan timah di Indonesia: abad ke-18-abad ke-20 : sekitar sejarah perkembangan teknologi dan pengelolaan penambangan timah di Indonesia*. Jakarta: Ibalat Communication.

Jurnal:

- Haridjaja, dkk. 2011. *Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Lahan yang Terkena Dampak Penggunaan Lahan Tambang*.
- Apriawan, “Teori Hijau: Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional”, Jurnal Multyversa, Volume 1 No 02, 2009.
- Antasari Et Al., “Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kediri”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Kediri: Universitas Islam Kediri, Volume 5 Nomor 2 (2019)
- Dewi Wungkus Antasari et al., “Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kediri” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Kediri: Universitas Islam Kediri, Vol 5, no 2 (2019)
- Ayu Multika Sari, Andy Fefta Wijaya, And Abdul Wachid, “Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi Pada Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu)” *Jurnal Administrasi Publik*, Malang: Unuversitas Brawijaya, Volume 2 Nomor 4 (2012)
- Siti Asiyah, “Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau (Green Economy) Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Provinsi Kalimantan Tengah,” *Skripsi*, Palangka Karaya; Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 2017
- Nurlinda, “Konsep Ekonomi Hijau (Green Economic) Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan,” *Artikel Pada Jurnal Legal Review*, 2012

Peraturan dan Undang-Undang:

- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah No 4 tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019-2015
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah No 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Internet:

- Ismi, Roni. 2022. “Tambang Timah dan Masa Depan Generasi Muda Bangka Belitung”.
<https://www.mongabay.co.id/2022/12/27/tambang-timah-dan-masa-depan-generasi-muda-bangka-belitung/>. Mongabay. di akses pada 11:05 juni 5, 2024.



- Martini, Rini. 2019. “Bupati Dorong Desa Manfaatkan "Kolong" Bekas Penambangan Timah”.
<https://bangkatengahkab.go.id/berita/detail/media/bupati-dorong-desa-manfaatkan-kolong-bekas-penambangan-timah>. Antara News. di akses pada 14:27 Juni 1, 2024.
- Zulkifli, A. (2014, February 15). *Ling. Sosial: Politik Hijau atau Green Politics*. Diakses pada 4 April 2023, dari Consultant Lingkungan dan Energi: <http://www.bangazul.com>